

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN *ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION (AFOCO)* DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN 2016-2019

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Dewi Puspita

NIM. I02216005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

AGUSTUS 2020

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Dewi Puspita
NIM : I02216005
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest
Cooperation Organization (AFCO)* dalam Mewujudkan
Sustainable Development Goals tahun 2016-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil hasil plagiasi, saya berhasil menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 28 Juli 2020

Yang menyatakan

MILITERAI
TIMPEL
BAEF981061653
6000
Rp. 6000
Dewi Puspita
NIM: I02216005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Puspita

Nim : I02216005

Program Studi : Hubungan International

Yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals Tahun 2016-2019*”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan International.

Surabaya, 28 Juli 2020
Pembimbing



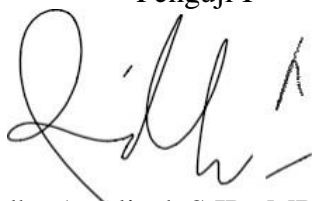
Ridha Amaliyah, S. IP, MBA
NIP: 201409001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dewi Puspita dengan judul “**Implementasi Kerjasama Indonesia dan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2019**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim penguji Skripsi pada tanggal 07 Agustus 2020

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah S.IP, MBA
NIP. 201409001

Penguji II



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Rizki Rahmadini N, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Penguji IV



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Surabaya, 07 Agustus 2020
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI PUSPITA
NIM : I02216005
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : dewi.puspita11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN *ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION (AFOCO)* DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN 2016-2019


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Penulis


Dewi Puspita

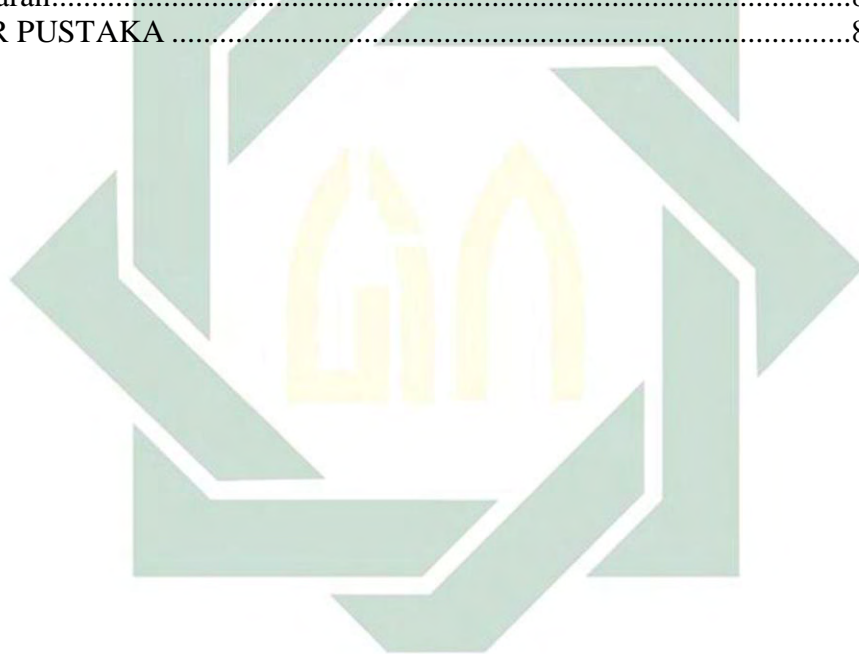
Dewi Puspita, 2020, "Implementation of Indonesia and the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) Cooperation in Accomplishing the Sustainable Development Goals 2016-2019", Undergraduate Thesis of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

This study aims to examine the implementation of Indonesia and Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) cooperation in accomplishing Sustainable Development Goals in 2016-2019. Indonesia is a country with the 3rd largest deforestation in the world. The Indonesian government continues to promote deforestation and greenhouse gas emissions reduction. The method used is descriptive qualitative to explain in detail about the background as well as implementation of the cooperation programs. In this study, data collection techniques used are interview and documentation. To describe this phenomenon, this study uses the concept of international cooperation and Sustainable Development Goals. The results find that the implementation carried out by the cooperation is 1) developing capacity to support sustainable management of natural resources; 2) facilitating participatory community-based forest management planning; 3) capacity building to improve the assessment of forest resources and increase the involvement of local communities

Dewi Puspita, 2020, “Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2016-2019”, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : implementasi, kerjasama, Indonesia, AFOCO, hutan berkelanjutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dari kerjasama Indonesia dengan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* pada tahun 2016-2019. Indonesia adalah negara dengan deforestasi terbesar ke-3 di dunia. Pemerintah Indonesia terus menyerukan pengurangan deforestasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif guna menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang hingga implementasi program kerjasama. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Untuk menggambarkan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional dan SDG. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kerjasama Indonesia-AFoCO adalah: 1) mengembangkan kapasitas untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; 2) memfasilitasi perencanaan partisipatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat; 3) pengembangan kapasitas dalam meningkatkan penilaian sumber daya hutan dan meningkatkan keterlibatan komunitas lokal



Perluasan lahan perkebunan sawit mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan serta pengalihan lahan hutan untuk permukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi. Pengukuran deforestasi Indonesia sudah dilakukan sejak 1990⁵. Pada tahun 1996-2000 deforestasi tertinggi Indonesia tercatat capai 3,51 juta hektar. Dengan lahan kawasan hutan 2,83 juta hektar dan lahan non kawasan hutan 0,68 hektar, Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Kongo pada tahun 2018 menurut data *World Resources Institute (WRI)*. Seringnya konflik atas perizinan pengelolaan kawasan hutan, serta ancaman kebakaran hutan dan meningkatnya permukiman masyarakat merupakan penyebab banyaknya pengalihan lahan menjadi faktor pendorong terjadinya deforestasi⁶.

⁶ Ibid ,” Deforestasi di Indonesia Menurut Jenis Lahan (1990-2017)”

Sebuah keadaan yang mengancam deforestasi diusahakan oleh pemerintah untuk dikurangi kejadiannya. Hal tersebut terbilang sulit karena keadaan Indonesia dimana penduduknya hampir 300 juta hektar karena itu upaya yang dilakukan sedini mungkin ialah kesadaran masyarakat. Dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga memberlakukan beberapa kebijakan seperti rehabilitasi hutan, alokasi kawasan hutan pengendalian kerusakan gambut, pengendalian perubahan iklim, serta pengelolaan hutan lestari memberikan penambahan dampak pada penurunan deforestasi⁸.

Di Indonesia, hutan hujan tropis adalah hutan yang paling luas hal tersebut terlihat bagaimana posisi negara di kawasan Asia Tenggara yang banyak memiliki kawasan hijau dan memperoleh lebih baik berbagai flora dan fauna. Tidak mengungkiri jika kawasan Asia Tenggara banyak dilirik untuk kerjasama oleh berbagai negara di dunia salah satunya ialah negara

⁸ Forqan, B. N. *Hukum Lingkungan , Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum.

Korea Selatan mempunyai jejak yang baik dalam mengolah kehutanannya. Terbukti dunia mengakui Korea Selatan merupakan salah satu negara yang telah sukses dalam menanam tanaman pada area yang tergradasi seluas 2,1 juta ha dalam kurun waktu dari 1962-2018. Keberhasilan Korea Selatan tersebut tidak lepas dari Presiden Mr. Park Chung Hee kala itu yang menjadikan beliau pelopor proses reforestasi hutan di Korea Selatan. Hal tersebut terbukti dengan beliau yang sedikit agak memaksa jika setiap tanggal 5 April yang ditetapkan sebagai hari tanam nasional. Murid bersama orang tua serta guru harus pergi ke gunung untuk menanam, bahkan beliau tidak segan untuk turun langsung. Kesuksesan ini juga didorong adanya masyarakat mandiri serta kerjasama dalam masyarakat tersebut. Dengan partisipasi dan kerjasama masyarakat Korea Selatan tidak terlepas adanya keberhasilan Program Saemaul Undong atau gerakan membangun desa di Korea Selatan, satu program yang dicetuskan oleh Presiden Chung Hee¹⁰.

⁹ “Anugerah dari Hutan Indonesia,” INDONESIA.GO.ID, Redaksi. T, 2019, Diakses 2 Januari 2020, <https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia>

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rahasia Dibalik Kesuksesan Restorasi Hutan di Korea Selatan”, 2018, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/366

Low Carbon Green Growth sendiri memiliki tiga tujuan utama yaitu terkait masalah perubahan iklim dan kemandirian energi negara, menciptakan mesin pertumbuhan baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tiga tujuan utama tersebut dituangkan dalam 10 arah kebijakan diantaranya pengurangan emisi gas, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan kemandirian energi, pengembangan teknologi hijau dan penciptaan mesin pertumbuhan baru, penghijauan industri yang ada, pemeliharaan industri hijau, kemajuan infrastruktur industri, meletakkan dasar kelembagaan ekonomi hijau, menciptakan tanah air hijau dan sistem dan menjadi panutan komunitas internasional sebagai pemimpin dalam pertumbuhan hijau¹².

ian, W. "Rahasia Seoul yang Sukses Menjadi Kota Hijau". Okezone.com. 2013
 enas, *Country Natural Resources and Environment Assessment*, 2007

¹² Bappenas, *Country Natural Resources and Environment Assessment*, 2007

Penandatanganan naskah perjanjian AFoCO pada acara *ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit* yang diselenggarakan pada tanggal 1-2 Agustus 2016 di Pulau Jeju Korea Selatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan Indonesia selaku negara pemilik hutan tropis terbesar ke-3 di dunia sudah sewajarnya mengambil peran utama dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari¹⁴. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, atas nama Pemerintah Republik Indonesia

(<https://nasional.republika.co.id/berita/obb407368/indonesia-tandatangani-kerja-sama-kehutan-tingkat-asia>)

Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terbesar di Asia menegaskan komitmen untuk kerjasama bidang kehutanan di tingkat Asia dengan menandatangani perjanjian pendirian *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*. Perjanjian tersebut mencakup kerjasama tata kelola hutan yang lestari, perubahan iklim, dan pendanaan kegiatan-kegiatan di bidang Kehutanan¹⁵.

Dalam mendukung terwujudnya sistem penghijauan yang adil bagi masyarakat dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suatu terobosan yakni *Sustainable Development Goals* yang mana memiliki 17 Tujuan yang akan dicapai hingga tahun 2030.

[illegible]

Melalui konsep *Sustainable Development Goals* ini yakni adalah sejauh mana praktik kehutanan berkelanjutan menyeimbangkan kebutuhan lingkungan, satwa liar, dan komunitas hutan — mendukung pendapatan yang layak sambil melestarikan hutan kita untuk generasi mendatang. Ada banyak langkah praktis yang dapat dilakukan oleh komunitas atau bisnis untuk melindungi kesehatan dan umur panjang hutan sambil tetap mendapatkan keuntungan dari produksi dan penjualan kayu dan hasil hutan lainnya. Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan Dengan begitu kerjasama ini mendapatkan hasil yang optimal untuk mengembangkan kawasan yang ramah lingkungan juga aman bagi kawasan perhutanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan dalam skripsi ini yakni: Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan AFoCO dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* tahun 2016-2019?

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis :

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hubungan Internasional di era kontemporer ini, khususnya dalam konsentrasi mewujudkan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi kedepannya dalam hal penelitian-penelitian yang sejenis juga menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga menjadi sumber wawasan tambahan bagi peneliti dalam memahami dan mengembangkan ilmu Hubungan Internasional kontemporer terutama dalam mengkaji upaya Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*.

- ## E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)*” belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai pembanding dan pelengkap, peneliti menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi kajian literatur dan kepustakaan peneliti:

1. Penelitian oleh Nilla Oktaverina dalam skripsi yang berjudul “Tujuan Korea Selatan Mengusulkan Pembentukan *Asean Korea Forest Cooperation*”¹⁶ tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang apa

[illegible]

- ¹⁸ Febrianti, S, F. “Kebijakan Low Carbon Green Growth di Korea Selatan : Sebuah Tinjauan Politik Hijau”. 2018.1. diakses di (<https://eprints.umm.ac.id/43132/1/pendahuluan.pdf>)

Penelitian oleh Akhmad Viko Zakhary Santosa dalam jurnal yang berjudul “*Role of ROK Government in the ‘Green New Deal’ Policy*”, tahun 2011¹⁹. Penelitian ini menjelaskan tentang proses penetapan agenda kebijakan dalam pengembangan kebijakan Pertumbuhan Hijau di Korea. Diamati bahwa pemerintah baru memainkan peran utama dalam keseluruhan proses, dilihat dari peningkatan drastis dalam upaya membangkitkan opini publik oleh pemerintahan Lee Myung Bak. Hijau dalam Pertumbuhan Hijau melambangkan perlindungan lingkungan, sedangkan pertumbuhan adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, sementara ini mungkin tampak sebagai visi yang secara langsung berlawanan dideklarasikan sebagai visi kebijakan Korea yang akan menyatukan kebijakan dari berbagai tindakan. Persamaan keduanya ialah sama-sama menjelaskan penghijauan yang menjadikan semua elemen sebagai peran utama tak terkecuali untuk menjaga kawasan hijau. Dan perbedaannya adalah penelitian tersebut bahwa bagaimana pemerintah mengelola kebijakan dengan menjadikan dasar kebijakan atas penghijauan. Sedangkan skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan penghijauan kembali melalui program-program yang dicetuskan.

[illegible]

²¹ Adwat, R. *Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus: Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu*, Universitas Bengkulu, 2016

7. Penelitian oleh Kiki Ayudanti dalam skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat), Tahun 2017²². Penelitian ini menjelaskan efektivitas hutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga dalam pemenuhan beberapa

[illegible]

Adapun perbedaan dari ketujuh penelitian terdahulu dengan peneliti adalah, semua penelitian terdahulu kebanyakan masih berfokus pada kebijakan suatu daerah dalam menjaga ekosistem hutan. Peneliti pertama meneliti bagaimana membuktikan tujuan Korea Selatan adalah berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dalam kepentingan nasional Korea Selatan di kawasan ASEAN. Adapun peneliti kedua lebih condong pada hasil atau penerapan kebijakan *Green Growth* di Korea Selatan dan dampaknya. Hampir sama dengan peneliti kedua, peneliti ketiga memfokuskan kebijakan Politik Hijau tersebut dapat efisien atau tidak. *Green Growth* sebenarnya mirip dengan pembangunan berkelanjutan, dimana bertujuan untuk mendemonstrasikan bahwa perlindungan lingkungan dengan tidak

Peneliti menduga bahwa implementasi proyek AFoCO di Indonesia tahun 2016-2019 dilaksanakan melalui (1) reboisasi atau penanaman hutan kembali untuk memulihkan daerah yang terkena dampak deforestasi hutan, (2) penerapan izin penebangan hutan secara bertanggung jawab.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran awal dari topik permasalahan yang dengan latar belakang masalah dan alasan-alasan serta sisi-sisi penting dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian juga poin-poin tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kerangka konseptual ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut akan dijabarkan masing-masing yang terdiri dari beberapa paragraf. Penjabaran konsep tersebut bertujuan dalam membantu proses penelitian hingga analisis data penelitian.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, seperti metode pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga tahapan penelitian.

4. BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi penyajian data yang ditemukan selama penelitian berlangsung di lapangan. Data yang disajikan berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat disajikan berupa uraian tulisan, tabel dan gambar yang bisa mendukung hasil penelitian. Berikutnya, akan dijelaskan dan dianalisa hasil dari penelitian tersebut secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

5. BAB V. PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Peneliti juga mengajukan beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

Kerjasama internasional telah ada dan berkembang selama beberapa dekade terakhir sebagai landasan penelitian hubungan internasional. Definisi kerjasama internasional ini bersifat umum baik dari segi isu maupun aktor. Kerjasama tidak hanya terjadi antara individu namun juga diantara entitas kolektif seperti partai politik, organisasi, perusahaan, atau negara. Walaupun teori kerjasama internasional sering mendefinisikan kerjasama internasional dalam hal negara, ia juga dapat melibatkan aktor lain, terutama organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi nonpemerintah (LSM). Aktor yang beragam ini bekerjasama untuk berbagai tujuan di berbagai bidang isu: semisal IGO bekerjasama dengan negara untuk memerangi masalah lingkungan global²³.

²³ Xinyuan Dai, D. S. International Cooperation Theory and International Institutions. *International Relations Theory*, hal 3. 20 November 2017

[illegible]

Sugiono, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional²⁵:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi, politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama sama dengan aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola kepentingan berbeda, namun juga dapat memaksakan kehendak negaranya sendiri.

Kerjasama Internasional ini bersifat umum, yang mana tidak terikat pada jumlah anggota, rasa senang atau sedih, asal negara atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini memiliki suatu keuntungan karena melihat dari persyaratan tidak harus berasal dari wilayah tertentu jadi negara siapapun dapat bergabung semakin banyak anggota hal tersebut akan semakin baik. Sehingga dapat diketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut²⁶.

Kerjasama Internasional memiliki tujuan utama yakni memenuhi kepentingan nasional bagi para anggota yang tidak dimiliki di dalam

²⁵Muhadi Sugiono dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani , 2006, *Pengantar Hubungan Internasional* , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 15.

²⁶ Fatma, D. *Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*. Ilmugeografi.com. 2017

Kerjasama internasional itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara- negara yang terlibat di dalamnya. Pada dasarnya semua negara menginginkan keuntungan timbal balik yang optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu dalam pelaksanaannya sendiri dapat dilakukan dengan saling tukar menukar barang dan jasa, memperluas penggunaan teknologi, atau dalam pengelolaan sumber daya alam²⁸.

²⁷ Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, 2019

[illegible]

(kondisi geografis), kesamaan ideologi atau agama) yang dimiliki oleh negara negara yang menjalin kemitraan.

Teori kerjasama internasional dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi kerjasama Korea Selatan dan *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* dalam mengaplikasikan SDGs

B. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda kampanye global yang dicetuskan oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara di dunia, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target *Sustainable Development Goals (SDGs)*²⁹.

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai prinsip *universality*. Prinsip mendorong penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini memiliki arti bahwa *Sustainable Development Goals (SDGs)* dilaksanakan dengan

²⁹ SDGs Indonesia. *Apa itu SDGs ?* Jakarta: Sustainable Development Goals.2017

- ³⁰ Penyusun, T. *Potret Awal Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2016

[illegible]

- [illegible]

11. *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan komunitas berkelanjutan) : Menjadikan kota berkelanjutan berarti menciptakan peluang karir dan bisnis, perumahan yang aman dan terjangkau, dan membangun masyarakat dan ekonomi yang tangguh. Ini melibatkan investasi dalam transportasi publik, menciptakan ruang publik hijau, dan meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan dengan cara partisipatif dan inklusif.
12. *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) : Mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah sama pentingnya, seperti juga mendukung negara-negara berkembang untuk bergerak ke arah pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Sebagian besar populasi dunia masih mengkonsumsi terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dapat membantu ketahanan pangan, dan menggeser kita ke arah ekonomi yang lebih efisien sumber daya.
13. *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim) : bertujuan untuk memobilisasi US \$ 100 miliar setiap tahun pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan berinvestasi dalam pembangunan rendah karbon. Tindakan-tindakan ini juga harus berjalan seiring dengan upaya untuk mengintegrasikan langkah-langkah risiko bencana, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, dan keamanan manusia ke dalam strategi pembangunan nasional.

14. *Life Below Water* (Ekosistem laut) : Lebih dari tiga miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. SDG bertujuan untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dari polusi, serta mengatasi dampak pengasaman laut. Meningkatkan konservasi dan penggunaan sumber daya berbasis laut secara berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi lautan kita.
15. *Life on Land* (Ekosistem darat) : Setiap tahun, 13 juta hektar hutan hilang, sementara degradasi lahan kering yang terus-menerus telah menyebabkan penggurunan 3,6 miliar hektar, secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat miskin. Hampir 7.000 spesies hewan dan tumbuhan telah diperdagangkan secara ilegal. Tindakan mendesak harus diambil untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan bersama kita dan mendukung ketahanan pangan dan air global, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perdamaian dan keamanan.
16. *Peace, Justice and Strong Institutions* (Perdamaian, keadilan, dan institusi kuat) : Kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga lazim di mana ada konflik, atau tidak ada aturan hukum, dan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka yang paling berisiko. SDG bertujuan untuk secara

signifikan mengurangi semua bentuk kekerasan, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri konflik dan ketidakamanan.

17. *Partnerships for The Goals* (Kemitraan untuk mencapai tujuan) :

Dunia lebih saling terhubung dari sebelumnya. Meningkatkan akses ke teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi gagasan dan menumbuhkan inovasi. Kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara berkembang mengelola utang mereka, serta mempromosikan investasi untuk yang paling tidak berkembang, sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan³².

Dengan hanya sepuluh tahun tersisa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, para pemimpin dunia pada KTT SDGs pada bulan September 2019 menyerukan satu dekade tindakan dan pengiriman untuk pembangunan berkelanjutan, dan berjanji untuk memobilisasi pembiayaan, meningkatkan implementasi nasional dan memperkuat lembaga-lembaga untuk mencapai tujuan dengan tanggal target 2030, Sekretaris Jenderal PBB meminta semua sektor masyarakat untuk memobilisasi aksi selama satu dekade pada tiga tingkatan: (1) aksi global untuk mengamankan kepemimpinan yang lebih besar, lebih banyak sumber daya, dan solusi yang lebih cerdas untuk SDGs, (2) tindakan lokal yang menyematkan transisi yang diperlukan dalam kebijakan, anggaran,

³² (2019). *Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) 2045*. CloudHost.

Penerapan *Sustainable Development Goals* yang konsisten dapat memberikan kesadaran betapa pentingnya memulihkan keadaan hutan demi mewujudkan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest*). Konsep *sustainable forest* yang dimaksud ialah menyeimbangkan fungsi kawasan hutan dengan masih sejalan dengan kebutuhan akan ekonomi sosial, maupun politik. Beberapa poin sangat relevan dengan isu kehutanan saat ini yakni, Tujuan ke 8, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 15. Isu kehutanan butuh penopang yang menjanjikan menjalankan programnya diharapkan dengan tujuan-tujuan dari *Sustainable Development Goals* tersebut menempuh hal yang lebih baik dalam pemulihan hutan saat ini.

1. Implementasi

³³ United Nation. *The Sustainable Development Agenda*. 2020

Dengan mengacu pada tujuan awal judul tersebut, implementasi ini berfokus pada penerapan *Sustainable Development Goals* pada program yang dicetuskan AFoCO di Indonesia. Penerapan disini maksudnya adalah bagaimana usaha AFoCO juga pemerintah berusaha dalam pengolahan hutan di masing-masing kawasan yang akan diberdayakan. Tindak lanjut dari masing-masing program AFoCO akan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat nantinya. Melihat konsistensi pemerintah dalam mengolah kehutanan menjadi lebih baik menjadikan kebijakan pemerintah dalam menentukan tata letak lahan, industri kayu juga pengolahan sumber daya masyarakat ini diharapkan dapat memberi suatu inovasi yang

³⁶ Wisnubro. *Indonesia dan Korea Selatan Memperkuat Kerja Sama Pengelolaan Lahan Gambut*. Jakarta: JPP.go.id. 2019

Organisasi *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) adalah organisasi antar negara yang berkomitmen untuk memperkuat kerja sama kehutanan regional dengan mengkonversikan teknologi dan kebijakan yang terbukti menjadi tindakan nyata dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mengatasi dampak perubahan iklim³⁷. Organisasi *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) memiliki kantor pusat yang letaknya di Korea Selatan namun mempunyai satu kantor pusat juga untuk wilayah Asia yakni di negara Vietnam.

a) pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan dan peningkatan layanan ekosistem, serta reboisasi dan rehabilitasi hutan;

[illegible]

[illegible]

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena³⁹.

[illegible]

Menurut Maleong, ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif, yaitu:

Menurut Maleong, ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian dengan teori dan disiplin ilmu, mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, penyusunan usulan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, yaitu meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Tahap analisis data, yaitu meliputi kegiatan mengolah data yang diperoleh melalui pengamatan peneliti, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian dengan teori dan disiplin ilmu, mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, penyusunan usulan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, yaitu meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Tahap analisis data, yaitu meliputi kegiatan mengolah data yang diperoleh melalui pengamatan peneliti, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan

4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
5. Tahap terakhir adalah melakukan kelengkapan syarat skripsi untuk diadakan ujian.⁴⁰

PLAN DATA

ulan data merupakan

menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan

akhir adalah melakukan kelengkapan syarat skripsi

ujian.⁴⁰

PENGUMPULAN DATA

pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan dasar dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik triangulasi yaitu.

menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan

akhir adalah melakukan kelengkapan syarat skripsi

ujian.⁴⁰

PENGUMPULAN DATA

pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan dasar dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik triangulasi yaitu.

menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan

akhir adalah melakukan kelengkapan syarat skripsi

ujian.⁴⁰

PENGUMPULAN DATA

pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan dasar dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik triangulasi yaitu.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 85-103.

Wawancara digunakan untuk mengetahui data tentang Implementasi Kerjasama Indonesia dan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada Kepala Staff Bagian Kawasan Asia Pasifik Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Peneliti dari Puslitbang terkait langsung program AFoCO Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi kerjasama kedua belah pihak.

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, sedangkan rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data, sebagai berikut.⁴¹

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak penting, maupun penambahan data yang ditinjau masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya tidak sedikit. Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan modelnya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dengan menyajikan data akan lebih memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal

[illegible]

Verifikasi Data (*Conclusions Drowing/Verifiying*)

G. TEKNIK PEMERIKSAAN DAN KEABSAHAN DATA

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini dapat didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan

dengan berbagai cara. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada Kepala Bagian Asia Pasifik juga Staffnya di Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Staff Puslitbang Hutan KLHK. Dari dua sumber data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian diminta kesepakatan (*member check*) dengan dua sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi, dokumentasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.
3. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data. Selain triangulasi, uji kredibilitas yang lain adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti hasil

wawancara didukung oleh adanya rekaman wawancara. Selanjutnya uji kredibilitas yang dipakai yaitu member cek, yaitu dari data yang diperoleh maka dikonfirmasi baik kepada individu yang bersangkutan atau kelompok diskusi pemberi data untuk melihat mana data yang disepakati dan mana yang ditolak.

4. Selanjutnya pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan uji *transferability*. Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Pengecekan keabsahan data selanjutnya adalah uji *dependability*, yaitu audit yang dilakukan oleh pembimbing, yaitu Bu Ridha Amaliyah. S.IP, MBA sebagai dosen pembimbing, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

Sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang luas, Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Dengan mempunyai kawasan hutan yang luas, masyarakat sangat mengandalkan sumber daya hutannya tak terkecuali dengan mengumpulkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai sektor industri olah kayu. Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Hutan tropis di Indonesia merupakan rumah bagi habitat flora dan fauna yang tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama⁴².

⁴² Charles Victor Barber. Dkk., *Keadaan Hutan Indonesia*, (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001), diakses 15 Februari 2020, <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2011/07/phki-2001-fwi-low-res.pdf>

[illegible]

Kawasan hutan ialah area khusus yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan ditujukan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak arus perekonomian lokal, regional dan nasional maupun global⁴⁶. Maraknya alih fungsi hutan dalam membuat kawasan hutan Indonesia untuk penghijauan semakin menyusut adapun dampak yang sangat terlihat ialah rawannya bencana. Seperti longsor karena proses penggudulan hutan yang berlebihan menyebabkan pohon tidak dapat menahan lajunya tanah, abrasi laut karena kurangnya pohon mangrove yang mana berfungsi meredam gelombang air laut saat pasang⁴⁷.

⁴⁷ “Kian Marak Alih Fungsi Hutan, Wajar Jika Alam tak Bersahabat,” Kompasiana.com, diakses 19 Februari 2020, <https://www.kompasiana.com/penaulum/5a232077d14aeb23533eef92/alih-fungsi-hutan-alam-bisa-tak-bersahabat>

B. FUNGSI KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara yang luas mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Hutan Produksi meliputi area seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan;
2. Hutan Konservasi meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan);
3. Hutan Lindung memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen⁴⁸. Komposisi sebaran peta indikatif areal perhutanan sosial terhadap kawasan hutan terdiri atas 12,4 juta ha (67%) berada di hutan lindung, 2,8 juta ha (15%) berada di hutan produksi, 2,6 juta ha (14%) berada di hutan produksi terbatas dan selebihnya berada di kawasan konservasi⁴⁹.
Setidaknya ada 19 jenis hutan yang berbeda di Indonesia, termasuk hutan pantai di pantai dan bukit pasir; hutan pasang surut seperti hutan bakau, nipah, dan palem; hutan kesehatan yang berhubungan dengan

⁴⁸ Ruandha Agung, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018.

⁴⁹ Hannah Timmins, *Opsi Legal Perlindungan Hutan Pada Lahan Zona Pertanian Di Indonesia*, 2017 <https://www.earthworm.org/uploads/files/OPSI-LEGAL-PERLINDUNGAN-HUTAN-IN-INDONESIA-PADA-LAHAN-ZONA.pdf>

Dari 4.000 spesies pohon di Indonesia, hanya 120 spesies kayu keras yang diakui cocok untuk penggunaan komersial. Dari jumlah tersebut, sekitar 48 digunakan dalam industri kayu lapis. Dari angka resmi 144 juta hektar, 34% ditujukan untuk perlindungan dan Taman Nasional, dan 21% ditujukan untuk konversi ke penggunaan lain. 45% sisanya dikelola untuk produksi kayu dan produk hutan lainnya⁵¹.

Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu⁵². Hutan produksi telah menjadi salah satu sumber utama untuk mendukung pembangunan ekonomi bagi banyak negara Asia-Pasifik. Ini menghasilkan baik produk kayu dan non-kayu serta jasa lingkungan, yang menghubungkan kehutanan dengan ekonomi dan peraturan iklim dan air, untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut⁵³.

Kekhawatiran tentang menipisnya hutan dunia, termasuk di kawasan Asia-Pasifik, telah menyebabkan banyak seruan internasional untuk upaya serius untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan meningkatkan pengelolaan hutan. Kekhawatiran ini mencerminkan apresiasi terhadap

⁵² Mega Dinda Larasati, *Hutan Produksi : Pengertian, Jenis, Sebaran, dan Peraturan*, Forester Act. 2016, diakses 21 Februari, <https://foresteract.com/hutan-produksi/>

[illegible]

Deforestasi juga dapat disebut sebagai penghilangan hutan yang menyebabkan beberapa ketidakseimbangan secara ekologis dan lingkungan. Dampak langsung dari berkurangnya hutan ialah akan menyebabkan timbulnya dampak jangka panjang yang menjadikan hutan hujan tropis semakin terkikis oleh deforestasi jika masalah tersebut tidak segera diatasi⁵⁵. Deforestasi sendiri bisa disebut dengan perubahan secara tetap dari area berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Industri sawit, yang dapat ditemukan dalam segala hal mulai dari sampo hingga garam Pertanian, penggembalaan ternak, pertambangan, dan pengeboran merupakan lebih dari setengah deforestasi. Di Malaysia dan Indonesia, hutan ditebang untuk membuat jalan untuk memproduksi minyak kelapa⁵⁶.

⁵⁴ “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019,” Karhutla Monitoring Sistem, Diakses 20 Februari 2020, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

⁵⁶ Christina Nunez, *Deforestation explained*, National Geographic, 2019, diakses 20 Februari 2020, <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/>

Kondisi lain penyebab hutan mengalami penurunan ialah deforestasi yang terjadi secara terus menerus tanpa terkendali. Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di dunia, bahkan melebihi Brasil sementara hanya memiliki seperempat luas hutan Brasil. Pemicu utama deforestasi adalah dalam urutan besarnya berikut ini: industri kelapa sawit, *illegal logging*, industri pertambangan, ekspansi kota⁵⁸.

Selama beberapa tahun terakhir ini 2011-2016, para pakar menemukan industri sawit telah menyebabkan deforestasi seluas 2,08 juta hektar atau 23 persen dari kerusakan hutan nasional. Di Indonesia proses pembuatan perkebunan kelapa sawit yakni dengan mengeringkan lahan gambut yang mengandung banyak karbon dan mudah terbakar⁵⁹. Komoditas kelapa sawit di Indonesia dalam satu dekade terakhir terus mengalami kenaikan. Menurut Gabungan

⁵⁹ “Indonesian Forests & Palm Oil,” GreenPeace, diakses 15 Februari 2020, <https://www.greenpeace.org/usa/issues/indonesian-forests-palm-oil/>

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, kelapa sawit dapat diproduksi paling tidak 40 juta ton per tahun mulai dari tahun 2020⁶⁰.

Akibat lingkungan dari industri perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi juga dampak yang negatif bagi Indonesia. Selain itu, ketidakseimbangan di lingkungan ditemukan dalam bentuk gangguan di tanah, hilangnya karbon dari biomassa, serta akumulasi bahan organik karena rawa gambut untuk pembangunan kelapa sawit. Penggunaan seperti pupuk dan pestisida juga mengancam ekosistem darat dan perairan di wilayah tersebut⁶¹.

2. *Illegal Logging*

Pembalakan liar didefinisikan sebagai kegiatan rantai pasokan kayu ilegal, yang meliputi penebangan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, penjualan, dan pembelian serta pemanfaatan kayu ilegal. Penebangan liar juga termasuk penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah atau dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan izin⁶². Penebangan liar memiliki dampak besar pada hilangnya hutan tropis di negara-negara utama yang menyebabkan sebagian besar deforestasi.

Persoalan pembalakan liar memang sulit untuk diatasi karena luasnya hutan Indonesia, tidak memungkiri jika ada pihak-pihak yang

⁶⁰ Indonesian Rainforests, "Rainforest Action Network", diakses 18 Februari 2020, <https://www.ran.org/indonesian-rainforests/>

⁶¹ “Dampak Kelapa Sawit”, Tuk Indonesia, 2015, <https://www.tuk.or.id/2015/01/22/dampak-kelapa-sawit/>

⁶² Luca Tacconi, *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, Center for International Forestry Research (CIFOR), 2003, diakses 11 maret 2020, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/btacconi0402.pdf

3. Pertambahan

Sektor pertambangan di Indonesia menyumbang sekitar 7 persen dari deforestasi nasional. Hal tersebut dikarenakan jika membuka suatu lahan untuk pertambangan maka, dibutuhkan beberapa luas hutan yang akan hilang. Sejalan dengan kontribusinya dalam mengurangi pepohonan, pertambangan Indonesia kian hari makin meluas⁶⁴.

Meskipun sektor tambang Indonesia tidak sebagus kawasan asia lainnya dikarenakan adanya kebijakan mengurangi ekspor bahan tambang ke luar negeri guna mencegah dampak negatif bagi lingkungan. Pertambangan Indonesia memang kurang menarik dikarenakan regulasi yang tidak pasti. Kasus contoh terbaru ialah

⁶³ “Pembalakan Liar sulit dipidana ?”, Kompasiana.com, 2015, <https://www.kompasiana.com/kotijah/54fec9f3a33311624450f8be/pembalakan-liar-sulit-dipidana>

⁶⁴ “Analisis dan Evaluasi pengelolaan sumber daya alam”,
https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf

penghentian ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini
dicetuskan oleh Menteri ESDM⁶⁵.

Namun karena kebijakan tersebut Indonesia mampu menahan laju pengurangan hutan tiap tahunnya. Memang ekonomi untuk pertumbuhan kualitas masyarakat penting, namun menjaga hutan tetap pada fungsinya juga hal yang sulit.

4. Urbanisasi

Urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota ini menyangkut pertambahan masyarakat di kota. Suatu proses sosio-ekonomi yang memiliki banyak segi antara lain, perubahan sikap hidup, berubahnya mata pencaharian, khususnya dari pertanian ke industri⁶⁶. Semakin berkembangnya industrialisasi menyebabkan banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun untuk memenuhi sumber daya manusia agar dapat bekerja. Ini merupakan dampak yang cukup negatif bagi lingkungan.

Pengelolaan hutan akan semakin sulit, karena cepatnya laju urbanisasi yang memaksa kawasan hijau dihilangkan untuk membangun perumahan, pabrik dan sebagainya. Dampak positif dari urbanisasi pun tidak dapat dielakkan karena struktur ekonomi lebih bervariasi, berkembangnya usaha wiraswasta, berkembangnya bidang

⁶⁵ Gora Kunjana, "Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan pada 2019", 2018, diakses pada 11 maret 2020, <https://investor.id/archive/peluang-dan-tantangan-sektor-pertambangan-pada-2019>

⁶⁶ Ishak, *Urbanisasi dan dampaknya bagi lingkungan*, Jurnal UGM, Humaniora Volume XIII NO 3, 2001, file:///C:/Users/Admin/Downloads/734-896-2-PB%20(1).pdf

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah membuat negara-negara bertekad untuk mengadakan kerjasama. Salah satu negara ialah Korea Selatan yang menjadikan Indonesia *partner* dalam bidang kehutanan. Dengan kerjasama kedua negara, Korea Selatan mendirikan *Korea Indonesia Forest Center*. Dimana *Korea Indonesia Forest Center* tersebut didirikan pada tanggal 29 Juni 2010, ketika *Discussion Note* antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan Korea mengenai Pembentukan dan Operasi *Korea Indonesia Forest Center* ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembentukan *Korea Indonesia Forest Center* adalah untuk menanggapi meningkatnya proyek kerja sama di bidang kehutanan antara Korea dan Indonesia. Melalui pembentukan *Korea Indonesia Forest Center*, diharapkan komunikasi antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Dinas Kehutanan Korea menjadi lebih efektif, terutama dalam hal implementasi proyek dalam kehutanan⁶⁸.

⁶⁷ Andi Muhammad Nur Fauzan Hayyu, *“Mengelola Urbanisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi”*, detikNews, 2019, diakses 11 Maret 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4504255/mengelola-urbanisasi-untuk-pertumbuhan-ekonomi>

.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan beberapa pertemuan tersebut diatas terlihat jika Korea Selatan sejak dulu sudah menaruh hati pada lingkungan hutan di Indonesia. Di luar untuk kepentingan nasional namun sebagian besar hutan tersebut juga digunakan untuk mereforestasi kehutanan yang sudah gundul. Dengan beberapa perjanjian kedua negara dicetuskan beberapa kesepakatan akan perlindungan untuk hutan juga pemberian izin lahan bagi Korea Selatan.

1. Indonesia – Jerman

[illegible]

Kerjasama ini dilaksanakan baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Saat ini kerjasama Indonesia dengan Jepang meliputi berbagai aspek bidang kehutanan, antara lain bidang konservasi pengembangan sumberdaya manusia, dan bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan. Kerjasama dengan pemerintah Jepang dilakukan melalui kerjasama bilateral regional maupun multilateral dalam bentuk *loan* (pinjaman) dan *grant* (hibah). Kerjasama tersebut pada umumnya dalam bentuk *grant-aid*, *technical assistance*, serta pengiriman staf Departemen Kehutanan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya di Jepang. Instansi Pemerintah Jepang yang menjadi mitra kerja dalam kerjasama ini adalah Forestry Agency (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), Ministry of Foreign Affairs, Environment Agency dan JICA (Japan International Cooperation Agency). Kerjasama bilateral mendatang sebagai hasil dari kunjungan Duta Besar Kazuo Asakai, akan dilakukan dalam kerangka Inisiatif Kerjasama Kehutanan Asia.

[illegible]



The image displays the logo and color palette for the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO). The logo features a stylized graphic of four overlapping circles in green, teal, and brown, followed by the acronym "AFoCO" in a bold, dark brown sans-serif font. Below the logo, the full name "Asian Forest Cooperation Organization" is written in a smaller, dark brown sans-serif font. To the right of the logo, a color palette is shown, consisting of five color swatches with their corresponding names and RGB values. The colors are: Broad-leaved forests (Light green, RGB 122, 193, 66), Broad-leaved forests in the tropical/temperate region (Light green, RGB 122, 193, 66), Broad-leaved forests in the boreal/alpine region (Dark green, RGB 0, 146, 126), Coniferous forests in the boreal/alpine region (Dark green, RGB 0, 146, 126), and Inhabitants including wildlife and people (Dark brown, RGB 121, 68, 0).

Color Name	RGB Value
Broad-leaved forests	122, 193, 66
Broad-leaved forests in the tropical/temperate region	122, 193, 66
Broad-leaved forests in the boreal/alpine region	0, 146, 126
Coniferous forests in the boreal/alpine region	0, 146, 126
Inhabitants including wildlife and people	121, 68, 0

AFoCO memiliki pengaturan kelembagaan dengan dua organ, yaitu "Majelis," dan "Sekretariat." Majelis adalah badan pembuat keputusan yang terdiri dari perwakilan semua pihak dalam perjanjian. Sekretariat, dipimpin oleh direktur eksekutif dan berlokasi di Korea,

[illegible]

AFoCO melakukan berbagai program kerja sama kehutanan yang dirancang untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan untuk mengatasi perubahan iklim di negara-negara anggota dan seluruh Asia. Ini juga akan mewakili kepentingan Korea Selatan dan negara-negara anggota lainnya dengan mengambil bagian aktif dalam negosiasi tentang isu-isu internasional utama di bidang kehutanan⁷⁷. AFoCo memiliki 15 negara anggota yaitu : Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Kazakhstan, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam yang mana negara tersebut bergabung untuk memperbaiki keadaan hutan. Pada 2016, Perjanjian AFoCO baru ditandatangani tiga negara yaitu Korea, Timor Leste, dan Indonesia. Perjanjian tersebut akan diberlakukan entry into force sedikitnya lima negara meratifikasi.

77 “Agreement on Establishment of Asian Forest Cooperation Organization to be Brought into Force,” Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, Diakses 15 Februari 2020, http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=319802&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm=

1). Dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan Organisasi harus terdiri dari kontribusi wajib dan sukarela.

3). Kontribusi dalam bentuk barang mengacu pada kontribusi non-moneter, yang nilainya dapat dikaitkan dengan biaya menghadiri pertemuan atau acara resmi, menyelenggarakan pertemuan atau acara resmi dan kegiatan lain yang mungkin ditentukan dan disetujui oleh Majelis.

4). Para Pihak dapat memberikan kontribusi sukarela tambahan untuk Organisasi.

⁷⁸ *The Assembly of Asian Forest Cooperation Organization*

Program ini diikuti oleh dua negara yaitu Vietnam dan Thailand. mempunyai durasi waktu 2 tahun dari tahun 2016-2018. Program ini bertujuan untuk mengembangkan spesies berharga tinggi sebagai mekanisme pengelolaan hutan berkelanjutan & peningkatan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan mata pencaharian masyarakat lokal di Vietnam dan Thailand melalui pengembangan spesies bernilai tinggi.

d. Facilitating the Participatory Planning of Community-based Forest Management Using GIS & RS Technologies in Forest Resources Management

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan partisipatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat menggunakan teknologi GIS & RS dalam pengelolaan sumber daya hutan. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk berkontribusi pada peningkatan sumber daya hutan dan pengelolaannya, khususnya di daerah pemukiman masyarakat.

Promosi program ini diikuti oleh negara Kamboja dan Vietnam, dengan memiliki waktu yang cukup lama untuk mengimplemenatasikannya yakni lima tahun (2015-2019).

[illegible]

Program ini bertujuan untuk pengembangan kapasitas dalam meningkatkan penilaian sumber daya hutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

g. Reclamation, Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest Ecosystems (RRR-DFE) in Mekong Basin Countries

Program kedua dengan anggota negara terbanyak yakni diikuti oleh 5 negara yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, memiliki waktu durasi selama 2 tahun yakni 2013-2015.

Program ini bertujuan reklamasi, rehabilitasi & restorasi ekosistem hutan terdegradasi (RRR-DFE) di Negara-negara Lembah Mekong. Sasaran dan Tujuan Proyek RRR-DFE bertujuan

Dalam proyeknya di Indonesia, *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* mempunyai kawasan yang akan observasi untuk menerapkan program yang usulkan yakni :

- 1) Pengembangan Kapasitas untuk Pendekatan Lansekap untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- 2). Memfasilitasi Perencanaan Partisipatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Menggunakan GIS (Sistem Informasi Geografis) & RS (Teknologi Penginderaan Jauh) Teknologi dalam Manajemen Sumber Daya Hutan
- 3). Pengembangan Kapasitas dalam Meningkatkan Penilaian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan Keterlibatan Komunitas Lokal untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim⁸⁰.

[illegible]

- 1) Hutan Desa Paru Sijunjung, Sumatera Barat
- 2) Kemitraan Kehutanan Cempaka Batutegi, Lampung
- 3) Hutan Komunitas Tuar Tana Sikka, Nusa Tenggara Timur.

- 1) Hutan Desa Paru Sijunjung, Sumatera Barat
- 2) Kemitraan Kehutanan Cempaka Batutegi, Lampung
- 3) Hutan Komunitas Tuar Tana Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dihadapkan dengan berbagai keterbatasan kapasitas teknis dalam perencanaan, memantau dan melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan hutan.

[illegible]

Dengan fasilitas AFoCO dapat melatih masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah bahan baku dari hutan⁸⁴. Menunjukkan bahwa perusahaan berbasis hutan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan rehabilitas hutan untuk memastikan keberlanjutan produk hutan. Masyarakat di Hutan Desa Paru bermaksud menjaga hutan tropis mereka sebagai hutan lindung dan melarang penebangan pohon. Masyarakat menyadari fungsi hutan dalam menyediakan air. Oleh sebab itu masyarakat Desa Paru mulai mengembangkan ekowisata dan produk hutan non kayu seperti rotan, madu, kemiri, kopi. Kegiatan ini merupakan upaya dan terobosan pertama yang dilakukan atas inisiatif bersama melihat potensi Nagari Paru kab. Sijunjung yang selama ini merupakan salah satu penghasil rotan di Sumatera Barat⁸⁵. Upaya ini dilakukan agar kedepannya Sijunjung bukan hanya menjadi penyokong bahan baku namun juga mampu menjadi penghasil produk rotan yang mampu bersaing di pasar. Alih teknologi ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan pola dan jenis ragam mata pencaharian masyarakat berbasis sumberdaya hutan; (1) Meningkatkan keterampilan anggota

⁸⁵ Ibid “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Forest Rehabilitation through Community Forest-Based Enterprise GIS Technology to Support Community Based Forest Management Planning in Indonesia”. Forest Research and Development Center – FORDIA

masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan sebagai mata pencaharian ; dan (3) Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengolah rotan dari bahan baku menjadi barang jadi sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk melalui pengolahan hasil hutan secara mandiri.

Kegiatan alih teknologi ini dilaksanakan selama 3 hari tanggal 3-4 Juli 2018 yang bertempat di Kantor Wali Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung Sumatera Barat. Alih teknologi ini diikuti oleh 20 peserta yang berlatar belakang pengrajin dan petani yang berasal dari anggota kelompok Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Paru, Sisawah dan Latang, KPHL Sijunjung-Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan fasilitator/instruktur dari Kelompok Keahlian Manusia dan Produk Industri serta kelompok Keahlian Manusia dan Ruang Interior dari Universitas Telkom sekaligus pemilik brand Akara Nusantara (produk rotan Indonesia) Bandung.

Dalam alih teknologi ini, dengan dana kontribusi dari perwakilan AFoCO sekitar 150 juta untuk pendanaan alat mesin dalam memperoleh hasil yang bagus dari pohon untuk pengolahannya dibutuhkan mesin yang dapat menjadi alat untuk mengolah kayu. Perwakilan fasilitator dari perwakilan AFoCO di Indonesia memberikan pemahaman tentang proses pengolahan rotan hingga menjadi produk furnitur rotan; bagaimana esensi desain dalam menjawab tuntutan bisnis; memperluas wawasan tentang perlunya pengembangan keterampilan dasar dalam pengembangan produk

Fokus program pada kawasan Batutegi ialah Pengembangan Kapasitas untuk Pendekatan Lansekap untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Kemitraan Kehutanan Cempaka dengan luas 170 ha terletak di Desa Sumber Bandung, Pringsewu Kabupaten, Provinsi Lampung. Itu di bawah pengelolaan Batutegi, Dinas Kehutanan Lampung. Ada 6 kelompok petani dengan total 170 anggota. Potensi Kemitraan Kehutanan Cempaka adalah Pala, karet, kopi, pisang, coklat, gula aren, kemiri, petai, durian, nangka, cengkeh dan jengkol⁸⁷. Kerjasama ini atas kontribusi dana dari AFoCO sekitar 140 jt diharapkan dapat memaksimalkan untuk pengelolaan sumber daya hutan.

⁸⁷ *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014-2023*, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Lampung, http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_BATU_TEGI.pdf

Dengan kerjasama ini dengan harapan menjadikan hutan di Batutege memperoleh manfaatnya dan dapat menghidupkan ekonomi sekitar desa. Kesadaran dalam rehabilitasi hutan yang didorong oleh alasan ekonomi telah memicu masyarakat di Provinsi Lampung. Dengan menanam spesien pohon multiguna yang dapat memberikan manfaat dan pendapatan bulanan diantaranya tanaman kayu.

Fokus program pada kawasan hutan di NTT ialah Pengembangan Kapasitas dalam Meningkatkan Penilaian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan Keterlibatan Komunitas Lokal untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim.

[illegible]

Hutan Rakyat Tuar Tana dengan luas 346,9 ha terletak di Desa Hikong, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Provinsi Tenggara di bawah pengelolaan Unit Pengelolaan Hutan Lindung Sikka. Terdiri dari 3 kelompok / blok dengan total 266 petani. Potensi kawasan hutan antara lain jambu mete, kemiri, kelapa, kakao, suren, palawan kenari, kasogi dan aranana⁸⁹.

Budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa Hikong dalam pengelolaan hutan membantu masyarakat dalam melestarikan hutan⁹⁰. Aturan adat masih terpelihara dengan baik, antara lain penentuan awal musim tanam dengan memperhatikan perubahan alam seperti melintasnya burung di wilayah desa. Masyarakat juga menganggap pohon adalah makhluk hidup, jika mereka ingin memanen pohon, mereka harus melalui beberapa ritual adat dan izin dari tetua adat dan harus menanam kembali pohon dua kali lebih banyak dari yang telah ditebang⁹¹. Selaras dengan adat masyarakat yang mana bila menebang pohon harus menanam lebih dari yang ditebang. Itu terbukti dapat membantu dampak kehilangan pohon dan mampu mengatasi perubahan iklim semisal ada bencana

⁹⁰ Ibid “http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=228”

[illegible]

G. Kerjasama Internasional dengan AFoCO (*Asian Forest Cooperation Organization*)

Begitu dalam cangkupan pembahasan tingkat internasional Indonesia dapat mengetahui negara-negara yang memiliki persoalan yang hampir sama. Kerjasama kedua negara memungkinkan saling menguntungkan dalam persoalan lingkungan hidup. Dalam mencapai suatu kesuksesan kemakmuran suatu negara butuh saling membantu. Kerjasama Internasional merupakan pintu awal dalam menjalin hubungan dengan suatu negara.

[illegible]

Dalam perspektif kerjasama internasional, negara Korea Selatan membentuk organisasi yang bernama *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* untuk mendorong terwujudnya visi Korea Selatan yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dalam kurun waktu 30 tahun. Alasan lainnya berdasarkan fakta mengapa Korea Selatan mencetuskan organisasi yang anggotanya ialah negara-negara di Asia, karena kawasan Asia mempunyai cukup banyak hutan untuk lebih menghasilkan oksigen.

Kerjasama ini menguntungkan pihak Asia karena sebagian besar biaya ditanggung oleh Korea Selatan itulah mengapa kerjasama ini termasuk kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Karena kedua negara juga negara-negara yang bergabung di *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* pun juga mempunyai komitmen yang kuat untuk pemulihan hutan kembali dan pencegahan deforestasi juga mencegah perubahan iklim.

Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan selama 15 tahun pelaksanaan

Korea Selatan sadar bahwa dalam mewujudkan visi tersebut tidak bisa sendiri, maka dari itu membutuhkan negara-negara yang mampu membantu mewujudkannya. Karena kedua negara juga negara-negara yang bergabung di *Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)* pun juga mempunyai komitmen yang kuat untuk pemulihan hutan kembali dan pencegahan deforestasi juga mencegah perubahan iklim.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat menerapkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk berkomitmen melaksanakan programnya juga memfokuskan lebih yakni melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah penting. Dengan penerapan SDGs ini Indonesia kini berusaha menghindari

⁹² “Indonesia dan SDG,” Media Indonesia, 2015, Diakses 28 Februari 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-sdg>

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan memberi dampak yang baik melalui program-program AFoCO. Program yang dicetuskan AFoCO yang bertempat di Sumatera Barat, Lampung, dan NTT telah dijalankan dengan baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Di antara 17 tujuan SDGs, program AFoCO di Indonesia terindikasi memenuhi 5 tujuan SDGs yakni :

- [illegible]

Manajemen hutan lestari perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- [illegible]

- Penerapan Konsep *Sustainable Development Goals* yakni mengindikasikan program apa saja yang dapat mewujudkan beberapa tujuan tersebut. Kontinuitas ekonomi masyarakat lokal dalam bentuk produksi makanan pokok berupa buah, sayur-sayuran, dan tanaman medis selama ini didukung oleh penanaman komoditas hutan. Peran hutan sebagai penyedia jasa layanan ekosistem lengkap dengan biodiversitas yang terkandung di dalamnya diketahui mampu memenuhi cita-cita perkembangan berkelanjutan bagi populasi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Tujuan Utama dari SDG's sebagai Pelindung Kelestarian Hutan ialah, Yang pertama adalah untuk memperbaiki kerusakan hutan di dunia melalui manajemen hutan yang berkelanjutan meliputi perlindungan, restorasi, aforestrasi dan reforestrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan degradasi hutan. Kedua untuk meningkatkan manfaat hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi meliputi peningkatan kehidupan yang berkelanjutan untuk komunitas yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Yang ketiga untuk Meningkatkan secara signifikan proporsi daerah perlindungan hutan di dunia beserta daerah manajemen hutan lainnya sebagai penghasil produk hutan. Dan yang terakhir adalah untuk mengubah penurunan dari dukungan pengembangan resmi maupun bantuan finansial tambahan maupun baru dari berbagai sumber dari implementasi manajemen hutan yang berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi yang dilakukan oleh AFoCO adalah

1) Mengembangkan kapasitas untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Kemitraan Kehutanan Cempaka dengan luas 170 ha terletak di Desa Sumber Bandung, Pringsewu Kabupaten, Provinsi Lampung di bawah pengelolaan Batutegi, Dinas Kehutanan Lampung sebagai daerah tangkapan air dari penampung Batutegi yang menjadi sumber air bagi daerah sekitarnya, menambah nilai manfaat jasa lingkungan dari hutan ini.

2) Memfasilitasi perencanaan partisipatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hutan Paru dengan luas 4.500 hektar terletak di Desa Paru, Provinsi Sumatera Barat. Alih teknologi ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan pola dan jenis ragam mata pencaharian masyarakat berbasis sumberdaya hutan; (2) Meningkatkan keterampilan anggota masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan sebagai mata pencaharian; dan (3) Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengolah rotan.

3) Pengembangan Kapasitas dalam Meningkatkan Penilaian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan Keterlibatan Komunitas Lokal untuk

Dalam proses penelitian hingga laporan skripsi ini, peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan batasan data dan ketidaksempurnaan peneliti menyampaikan penelitian maupun hasil penelitian, peneliti membuka selebar lebar nya kesempatan untuk memberi masukan maupun saran yang dapat menyempurnakan penelitian serta menambah wawasan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya, Indonesia dapat mengurangi tingkat deforestasinya, meskipun saat ini sudah mengalami penurunan. Kerjasama ini memungkinkan untuk kedua negara lebih aktif lagi dalam menggalakkan program untuk kelestarian hutan, baik Indonesia maupun Korea Selatan untuk lebih lestari lagi. Analisis yang dilakukan mungkin mempunyai banyak kesalahan, dengan begitu peneliti punya saran untuk pihak-pihak selanjutnya yang memiliki minat untuk membahas topik tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis berharap untuk para pembaca ataupun para studi Hubungan Internasional untuk menggunakan teori maupun konsep yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 15
- Ardianto, Y. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2019
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 85-103
- Verbeek, J. J. *International Organizations and Policy Implementation: Pieces of the Puzzle*. 4.2004
- William D Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis*, Marsedes Marbun, Bandung: CV Sinar Baru, hal. 284, 1992.
- Wirendro, Soelthon Gussetya, Frionny A., Isnenti Apriani, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia : Forest Watch Indonesia edisi Pertama 2011),

JURNAL

- Budy Resosudarmo, "Forest Land Use Dynamics in Indonesia", (Research Gate : ANU College of Asia and the Pacific, 2012), file:///C:/Users/Admin/Downloads/Forest_Land_Use_Dynamics_in_Indonesia%20(1).pdf
- Conserve Energy Future "Deforestation: Compromises of a Growing World.", <https://www.conserve-energy-future.com/causes-effects-solutions-of-deforestation.php>
- GreenFacts Scientific Board, "Valuing the ecosystem of the Indonesian rainforest.", <http://www.greenfacts.org/en/indonesian-forests/1-2/index.htm>
- GreenPeace, "Indonesian Forests & Palm Oil", <https://www.greenpeace.org/usa/issues/indonesian-forests-palm-oil/>
- Ishak, "Urbanisasi dan dampaknya bagi lingkungan", Jurnal UGM, Humaniora Volume XIII NO 3, 2001, file:///C:/Users/Admin/Downloads/734-896-2-PB%20(1).pdf
- SiPongi, "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019", Karhutla Monitoring Sistem, nlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

- # SKRIPSI

- [illegible]

- Anugerah dari Hutan Indonesia,”
y.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman
omi/anugerah-dari-hutan-indonesia
- / Bappenas SDGs. *Empat Pilar*
y.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784
_Serius_Indonesia_dalam_Melaksana
Goals_2015-2030.pdf
- ukung Hidup dan Kehutanan .
Kehutanan Di Tingkat Asia, Mer
FoCO". Jakarta:
nenlhk.go.id/siaran_pers/browse/366
- ukung Hidup dan Kehutanan, "Indo
t Kerja Sama Pengelolaan Lah
019,

- Kompasiana.com, “Pembalakan Liar sulit dipidana?”, 2015, <https://www.kompasiana.com/kotijah/54fec9f3a33311624450f8be/pembal-aka-n-liar-sulit-dipidana>
- Korea Indonesia Forest Center “HISTORY,”
- Media Indonesia, “Indonesia dan SDGs,” 2015, <https://mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-SDGs>
- Mega Dinda Larasati, “Hutan Produksi: Pengertian, Jenis, Sebaran, dan Peraturan”, Forester Act, 2016, <https://foresteract.com/hutan-produksi/>
- Mikaela Weisse, Elizabeth Dow Goldman, “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,” WRI Indonesia, 2019, <https://wri-indonesia.org/id/blog/dunia-kehilangan-hutan-primer-seluas-belgia-di-tahun-2018>
- Muhammad. Andi, “Mengelola Urbanisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi”, detikNews, 2019, diakses 11 maret 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4504255/mengelola-urbanisasi-untuk-pertumbuhan-ekonomi>
- Murdaningsih, D. “Indonesia Tandatangani Kerja Sama Kehutanan Tingkat Asia”. REPUBLIKA.CO.ID. 2016, (<https://nasional.republika.co.id/berita/obb407368/indonesia-tandatangani-kerja-sama-kehutanan-tingkat-asia>)
- Nancy Harris, Pete Potapov “Lanskap Hutan Utuh Penting untuk Perubahan Iklim. Inilah Tiga Alasannya,” WRI Indonesia, 2017, Diakses 3 Januari 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/lanskap-hutan-utuh-penting-untuk-perubahan-iklim-inilah-tiga-alasannya>
- Nunez. D, “Deforestation explained”, National Geographic, 2019, <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/>,
- Organization, A. F. *Article 12 Budget and Finance*. Seoul: AFoCO.2018
- SDGs Indonesia. “Apa itu SDGs?”, Jakarta: Sustainable Development Goals.2017
- Tuk Indonesia, “Dampak Kelapa Sawit”, 2015, <https://www.tuk.or.id/2015/01/22/dampak-kelapa-sawit/>
- Tuti “Direktur Eksekutif AFoCo Berkunjung Ke Kampus Badan Litbang dan Inovasi,” Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, 2016, <https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/2748>
- UNDP. Programme, U. N. *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*. 2019
- United Nation.” The Sustainable Development Agenda”.2020, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

- Viva Budy Kusnandar, “Deforestasi di Indonesia Menurut Jenis Lahan (1990-2017)”, Databoks, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017>
- WWF, “Forest,”, diakses 15 Februari 2020, https://www.wwf.or.id/en/about_wwf/whatwedo/forest_species/about_forest_species/forest/

SEMINAR

- Lilik Budi, Ellyn K, Syarif Indra, Mariana, “Pengarusutamaan Nilai, Status, Monitoring Biodiversitas dan Ekosistem.” Dipresentasikan di Seminar Nasional Konservasi Biodiversitas di Sub-Regional Sumatera Bagian Selatan, di Palembang pada tanggal 14-15 Januari 2015.

WEBSITE

- Carnemark, C." *Forests and the Environment*,2,".World Bank, 2013.
- Center for International Forestry Research,*Production Forests*, 2018,
- Charles Victor Barber, Emily Matthews, *Keadaan Hutan Indonesia*, (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001), <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2011/07/phki-2001-fwi-low-res.pdf>
- Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. dan Capistrano, D. *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*. CIFOR, Bogor, Indonesia.2009
- Emily. Matthews,. *The State of Forest Indonesia*, (Indonesia : World Resources Institute, 2002), diakses 18 Februari 2020, <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/45%20-%20The%20State%20of%20the%20Forest.pdf>
- Forqan, B. N. *Hukum Lingkungan , Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum.

- Hannah Timmins, *Opsi Legal Perlindungan Hutan Pada Lahan Zona Pertanian Di Indonesia*, 2017 <https://www.earthworm.org/uploads/files/OPSI-LEGAL-PERLINDUNGAN-HUTAN-IN-INDONESIA-PADA-LAHAN-ZONA.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014-2023*, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Lampung, http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_BATU_TEGI.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Menanam Pohon untuk Mengatasi Pemanasan Global*, Knowledge Center Perubahan Iklim, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/330-menanam-pohon-untuk-mengatasi-pemanasan-global>
- Luca., Tacconi, Krystof Obidzinski, Ferdinandus Agung, *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, Center for International Forestry Research (CIFOR), 2003, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/btacconi0402.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*,” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663, 2016, https://www.forda-mof.org/files/P.83_2016.pdf.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Puslitbang Hutan Perkuat Kerjasama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di KPHL Sikka NTT*,” Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, 2019. <https://www.forda-mof.org/berita/post/6232-puslitbang-hutan-perkuat-kerjasama-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-di-kphl-sikka-ntt>
- Ruandha Agung, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018, [file:///C:/Users/Admin/Downloads/1548037882%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/1548037882%20(7).pdf)
- Kuswardono Torry.,and Jan Pieter, *Pengetahuan Tradisional untuk menentukan Musim Tanam yang Berubah Studi kasus : Forum Iklim Lintas Aktor di 8 Desa di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan Provinsi NTT*

